



## Tak Ada Iming-iming

**KEPALA** Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar Ida Sundari memastikan jajarannya betul-betul menjalankan proses yang cukup panjang dan profesional dalam memberikan penilaian kepada pemerintah daerah.

“Tidak ada iming-iming atau kompensasi dalam bentuk apapun dari entitas,” ujar Ida di sela-sela penyerahan hasil pemeriksaan LKPD 2016, Selasa (6/6).

Ia menjelaskan, proses pemberian opini dilakukan berjenjang. Setelah tim melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dibahas oleh tim review opini perwakilan yang sudah memperoleh sertifikasi dari Pusdiklat (BPK).

Untuk opini yang perlu mendapatkan persetujuan BPK pusat, misalnya opini Pemerintah Provinsi Kalbar, pemeriksaan yang menggunakan tenaga pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik, (KAP). Serta opini yang meningkat menjadi WTP atau turun menjadi WDP.

“Untuk memberikan hasil opini atas hasil pemeriksaan tersebut, maka hasil pembahasan di perwakilan diusulkan ke pusat untuk direview oleh tim reuiu BPK pusat,” jelasnya.

Ia juga mengimbau auditor BPK Kalbar bekerja profesional dan sesuai standar. “Sebagai pimpinan di provinsi, kami senantiasa menginformasikan dan mengharapkan

seluruh auditor BPK melaksanakan tugas dengan baik dan jujur serta berintegritas,” ungkapnya.

Jika ada oknum auditor yang melakukan penyimpangan dalam pemeriksaan, maka pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis kode etik.

“Untuk auditor kita sudah ada kode etik pemeriksa. Kita menyampaikan ke pimpinan pusat di sana ada majelis kode etik menentukan hukuman yang diberikan kepada pemeriksa tersebut,” jelasnya.

Di Kalbar, jelasnya, masih ada lima kabupaten yang pemeriksaannya masih berjalan lantaran terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. “Kami masih turun ke lapangan. Kami belum tahu hasilnya apa,” pungkasnya. **(zul)**